

**PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 PERSPEKTIF *FIQH*
*SIYASAH***
**(Studi Kasus Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:
Amanda Dwi Kharisma
NIM.05020420024



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Dwi Kharisma
NIM : 05020420024
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Pengawasan Pembangunan Infrastruktur
Berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018
Perspektif *Fiqh Siyasah*
(Studi Kasus Kelurahan Blimbing Kecamatan
Paciran Kabupaten Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 November 2023
Saya yang menyatakan,



Amanda Dwi Kharisma
NIM. 05020420024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amanda Dwi Kharisma
NIM. : 05020420024
Judul : Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan
Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Perspektif *Fiqih
Siyasah*
(Studi Kasus Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munqaqasah.

Surabaya, 27 November 2023

Pembimbing,



Achmad. Safiuddin, R, M.I
NIP.199212292019031005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amanda Dwi Kharisma
NIM. : 05020420024

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

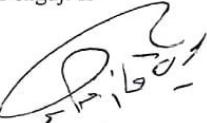
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Achmad Safudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji II



Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Penguji III



Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 11 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amanda Dwi Kharisma
NIM : 05020420024
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : mazidaamanda@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Januari 2024

Penulis

(Amanda Dwi Kharisma)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Blimbings, Kabupaten Lamongan. Kendala utama terjadi pada fokus perbaikan jalan yang mengabaikan kebutuhan masyarakat, terutama drainase. Kelurahan menghadapi masalah kerusakan jalan yang berulang dan drainase yang tersumbat, menyebabkan banjir musiman. Evaluasi hambatan dilakukan dengan menggunakan kerangka konsep *Fiqh Siyasah* sebagai dasar hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan untuk meningkatkan pengawasan dan implementasi pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan di tingkat kelurahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan Teknik pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi (data) untuk membahas permasalahan dengan menggunakan kaidah hukum dan kajian literatur yang terkait dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh kemudian di resduksi kemudian di sajikan dengan deskriptif analisis dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dan dari pandangan *Fiqh Siyasah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur di kelurahan Blimbings belum terlaksana dengan optimal sebagaimana yang di atur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat antara lain aturan hukum yang tidak memadai, kurangnya pengawasan dari kecamatan, tidak adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dan kurangnya kesadaran masyarakat. Sedangkan dari perspektif *Fiqh Siyasah*, penelitian ini fokus pada bidang *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* yang merujuk pada konsep *ulil al-amri* oleh seorang *Ulil amri*. Dalam penelitian ini yang disebut *Ulil amri* adalah Kepala Kecamatan Paciran dan Kepala Kelurahan Blimbings. Beliau merupakan pemerintah daerah kabupaten lamongan yang melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu melaksanakan pengawasan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Sebagai *Ulil amri*, lembaga ini dalam menjalankan tugasnya harus mampu menerapkan prinsip-prinsip utama yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip amanah dalam struktur pemerintahannya. Selain itu, apabila terdapat permasalahan terhadap jalannya program ini maka harus melakukan adanya musyawarah. Hal ini berlandaskan Al-Quran dan As-sunnah demi kemaslahatan masyarakat Kelurahan Blimbings.

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan diatas, penulis berharap agar pemerintahan kelurahan Blimbings lebih meningkatkan perhatian terhadap partisipasi masyarakat, menggali potensi serta aspirasi mereka dalam setiap tahap perencanaan pembangunan kelurahan. Dengan begitu, pelaksanaan pengawasan pembangunan infrsruktur di wilayah kelurahan Blimbings dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara lebih akurat, serta menerapkan prinsip tanggung jawab, adil serta Amanah sesuai persepektif *Fiqh Siyasah*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
A. Konsonan	xiv
B. Vokal	xv
C. Tā' Marbūtah	xvi
D. Penulisan Huruf Kapital	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi dan batasan masalah	10
C. Rumusan masalah	11
D. Tujuan penelitian	12
E. Manfaat penelitian	12

F. Penelitian terdahulu	13
G. Definisi operasional	18
H. Metode penelitian	20
I. Sistematika pembahasan	25
BAB II	27
KONSEP GOOD GOVERNANCE DAN FIQH SIYASAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	27
A. Konsep Good Governance	27
1. Pengertian Good Governance.....	27
2. Sejarah Good Governance	29
3. Prinsip Good Governance	32
4. Karakteristik Good Governance	34
5. Asas-asas Good Governance	35
6. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam UU Administrasi pemerintahan	36
7. Pemerintahan Daerah	39
8. Pengawasan Dalam Konsep Good Governance	44
B. Fiqh Siyasah	47
1. Pengertian dan ruang lingkup Fiqh Siyasah.....	47
2. Fiqh Siyasah Dusturiyyah	50
3. Pengawasan dalam Fiqh Siyasah	53
BAB III	57
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN BLIMBING	57
A. Gambaran Umum Kelurahan Blimbings Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.....	57
1. Gambaran singkat kecamatan Paciran	57
2. Struktur Kecamatan Paciran	58

3. Letak Dan Keadaan Geografis Kelurahan Blimbings	59
4. Keadaan Penduduk Kelurahan Blimbings	60
5. Stuktur Kelurahan Blimbings	62
6. Visi dan Misi Kelurahan Blimbings Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	63
B. Peran Camat Dalam Melakukan Pengawasan Di Kelurahan Blimbings.	
64	
C. Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Blimbings	69
BAB IV	85
TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 DI KELURAHAN BLIMBING	85
A. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Blimbings Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Di Kelurahan Blimbings	85
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Pelaksanaan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Blimbings Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.....	109
BAB V	116
PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Kecamatan Paciran.....	59
Tabel 2. Batas-Batas Wilayah Kelurahan Blimbings	60
Tabel 3. Jumlah Data Sekolah Di Kelurahan Blimbings	61
Tabel 4. Keadaan Agama	62
Tabel 5. Sarana Ibadah.....	63
Tabel 6. Struktur Kelurahan Blimbings	63

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara Kecamatan Paciran dan Kelurahan Blimbings	126
Gambar 2. Drainase tertutup di kelurahan Blimbings	126
Gambar 3. Drainase Terbuka Di Kelurahan Blimbings.....	127
Gambar 4. Banjir Di Kelurahan Blimbings	127



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli,. “*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.*” (Jakarta: Prenada Media Group), 2017.
- Abdul Galib, Iman Surya, And Nur Hasanah. “*Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara*” Vol.6 No.4 (2018).
- Abdul Ghaffar Karim. “*Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia.*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Abul fida’ bin isma’il bin umar bin katsir al-qursyi al-dimasyqy. “*Tafsir Ibnu Katsir Fi Tafsir Al-Qur'an al-Adhim.*” Juz 2, Mauqiu Majma’ al-Mulk Littibaat al-Syarifah: Dalam Sofware Maktabah Samilah, 2005.
- Achmad Safiudin. “*Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah* ” Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 6-Nomor 1 (April 2016).
- Agus Dwiyanto. “*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*” Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Ahmad Ibrahim. “*Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*” Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- anwar saifudin. “*Metode Penelitian.*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bagyo Trilaksono Sp, M.M. “*Kecamatan Paciran Dalam Angka 2022*” 2002.
<https://doi.org/Bps Kabupaten Lamongan-Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan>.
- Boby Segah. “*Peranan Pengawasan Internal Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik The Role Of Internal Supervision In Order To Realize Good Governance*” Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi, Stitute for Research and Community

- Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Vol 6, no. 2 (October 2020). <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. “*Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah/Daerah*” Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001.
- Djohermansyah Djohan. “*Problematik Pemerintahan Dan Politik Lokal.*” Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Fayik Ulinuha. “*implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Fisik Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Perspektif Siyasah Maliyah, (Studi Kasus Alokasi Dana Di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan)*” Skripsi- Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Febrian Akbar. “*Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*” Vol 1, No. 1 (2022).
- Hanafi Nurcholis. “*Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*” PT.Grasindo, Jakarta, 2005.
- Hardiyansyah. “*Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*” Gava Media, Yogyakarta, 2018.
- Haryani, T., & Kuswoyo, S. “*Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut.*” Jurnal Sociopolitico Vol 4(1) (2020). .
<Https://Doi.Org/10.54683/Sociopolitico.V4i1.57>.
- Hj. Sedarmayanti. “*Good Governance Bagian Ke-2(Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance.*” Mandar Maju, Bandung, 2004.
- H.M. Syafi“I. “*Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik.*” Malang: Averroes Press, 2007.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. “*Fiqih Siyasah; “Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam”.*” Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ija Suntana. “*Pemikiran Ketatanegaraan Islam.*” Bandung, Pustaka Setia, 2010.

Imam Amrusi Jailai. “*Hukum Tata Negara Islam*” Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

imanuddin. “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Kelurahan Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018, (Studi Kasus Di Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya),.*” Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari’ah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya, 2021.

Inu Kencana Syafei. “*Sistem Pemerintahan Indonesia.*” Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Inu Kencana Syafiie. “*Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia*” Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2003.

irfan tamwifi. “*Metodologi Penelitian*” Surabaya: UINSA Press, 2014.

J Sayuti Pulungan. “*Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran.*” Yogyakarta: Ombak, 2014.

Jeje Abdul Rojak. “*Hukum Tata Negara Islam*” Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Jimly Asshiddiqie. “*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.*” Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Jusuf Juhir. “*Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*” 2022.

Moh. Mahfud. MD. “*Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*” Yogyakarta: UUI Press, 1993.

Muchsan. “*Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan PTUN Di Indonesia.*” Liberty: Yogyakarta, 2007.

Muhammad Azhar. “*Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*” Jurnal Vol. XIII, NO 2 (September 2015).

- Muhammad Hafizh Rahyunir. “*Studi Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*” Jom Fisip Vol. 5 No 1 (April 2018).
- Muhammad Iqbal. “*Fiqh Siyasah; ‘Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam’*” Jakarta: Prenada Media Cet Ke-1 (2014).
- _____. “*Fiqih Siyasah.*” Jakarta: Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Pendekatan, 2014.
- Nana Herdiana Abdurrahman. “*Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*” Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Nomensen Sinamo S.H, M.H. “*Hukum Administrasi Negara*” Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Nurcholis. “*Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*” Jakarta, Grasindo, 2005.
- Nurul Fadhilah Majid. “*Peran Aparat Kelurahan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Lalebata*” Preprint, Open Science Framework, July 25, 2021.
<Https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/Ubczm>.
- Okparizan, O., & Septian, D. “*Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*” Kemudi Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2018.
- “Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945,”
- “Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.,”
- “Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73).,”
- “Peraturan Bupati Lamongan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan”
- “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengawasan Pembangunan Di Lingkungan Pemerintah Daerah”
- “Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan”
- “Peraturan Pemerintah No 73 Tentang Kelurahan”

“Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan”

Prianto, A. L. “*Good Governance Dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal Otoritas.*” Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1(1) (2022).

Rahyunir Rauf. “*Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan*” Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi Vol. III Nomor 1 (April 2017).

Ridwan HR. “*Hukum Administrasi Negara*” Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Safri Nugraha. “*Birokrasi Dan Good Governance: Reading Material*” Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Sakinah Nadir. “*Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa.*” Jurnal Politik Profetik Vol.1 No.1 (2019).

Sari Bella Putri Santosa. “*Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo)*” Skripsi Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Dalam Bidang Ilmu Politik-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik, 2008.

Sedarmayanti. “*Good Governance Kepemerintahan Yang Baik*” Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju, 2012.

Setiadi, Wicipto. “*Pokok-Pokok Pikiran Terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Makalah Seminar Naskah Akademik RUU Administrasi Pemerintahan, Kantor Kementerian PAN*” December 16, 2004.

Simamora. “*Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Pembangunan.*” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. “*Pengantar Hukum Islam*” Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Tomo HS. “*Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance* ” Jakarta: Indocamp, 2019.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”

“Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”

“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 30014 Tentang Administrasi Pemerintahan,”

Yudi. “*Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Ppmic) Di Keltirahan Sunter Jaya*” Skripsi-Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Jtirusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Syarif Hidayatt’llah Jakarta, 2010.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A